BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG

RENCANA KERJA
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Bakesbangpol), dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 guna memaparkan gambaran akan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung lingkup kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022, setelah *mereviuw* kembali capaian kinerja pada dua tahun sebelumnya, yang akan dijadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung.

Renja Bakesbangpol ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah) Kota Bandung dan Perubahan Renstra Kesbangpol yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023.

Akhirnya kami berharap agar Renja Bakesbangpol Kota Bandung 2022 ini lebih baik dan dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang berkelanjutan, menuju Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19671005 198903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

DAFTAR TABEL **iii**

DAFTAR GAMBAR **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.1.1 Pengertian Renja 2

1.1.2. Proses Penyusunan Renja 2

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 5

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 13

1.3.1 Maksud 13

1.3.2 Tujuan 13

1.4 Sistematika Penulisan 13

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 **16**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 16

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan 29

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN **43**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 43

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 46

3.3 Program dan Kegiatan 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **54**

BAB V PENUTUP **59**
5.1 Catatan Penting 59
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan. 59
5.3 Rencana Tindak Lanjut 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	*Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019*	II-2
Tabel 2.2	*Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota bandung*	II-7
Tabel 2.3	*Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2020*	II-10
Tabel 3.1	*Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota bandung*	III-2
Tabel 3.2	*Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021*	III-4
Tabel 4.1	*Rencana Kerja Pendanaan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju than 2021*	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	*Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota*	I-3
Gambar 1.2	*Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan penganggaran*	I-5
Gambar 1.3	*Bagan Hubungan Antar Dokumen*	I-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bandung melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung . Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dana Politik Kota Bandung menyusun Dokumen Renja 2022 yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan pelayanan KESBANGPOL Kota Bandung dapat berperan secara optimal.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Fungsi Penunjang lainnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan;
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

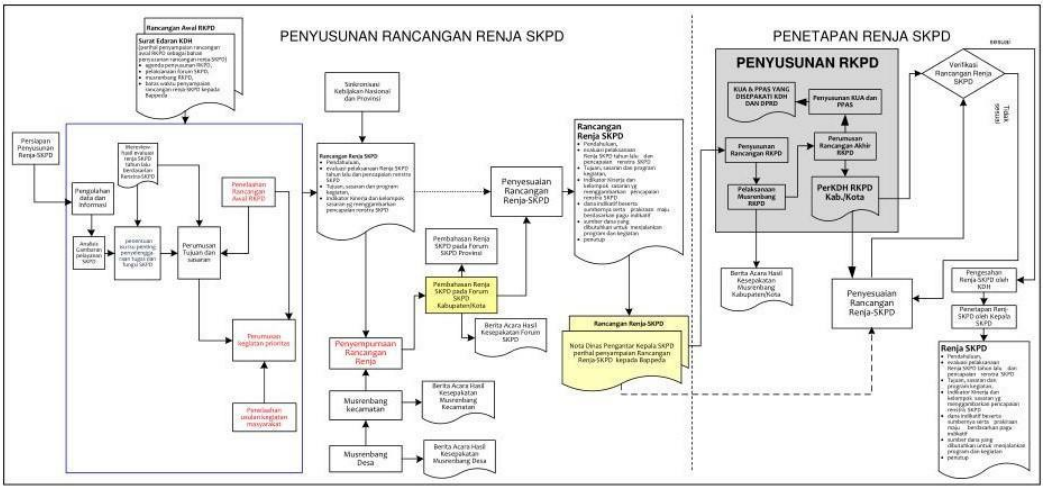

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
   - Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil

analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran pelayanan OPD;
   - Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan
   - Renstra OPD;
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
   - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
   - Perumusan tujuan dan sasaran;
   - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   - Perumusan kegiatan prioritas;
   - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
   - Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
   - Pembahasan forum OPD; dan
   - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dansasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

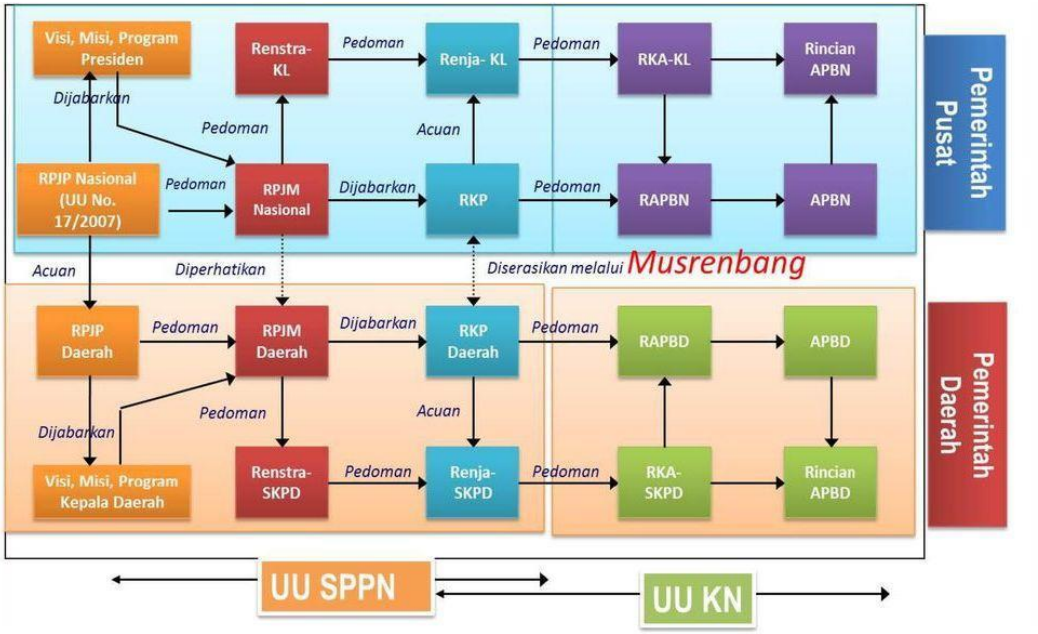

Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

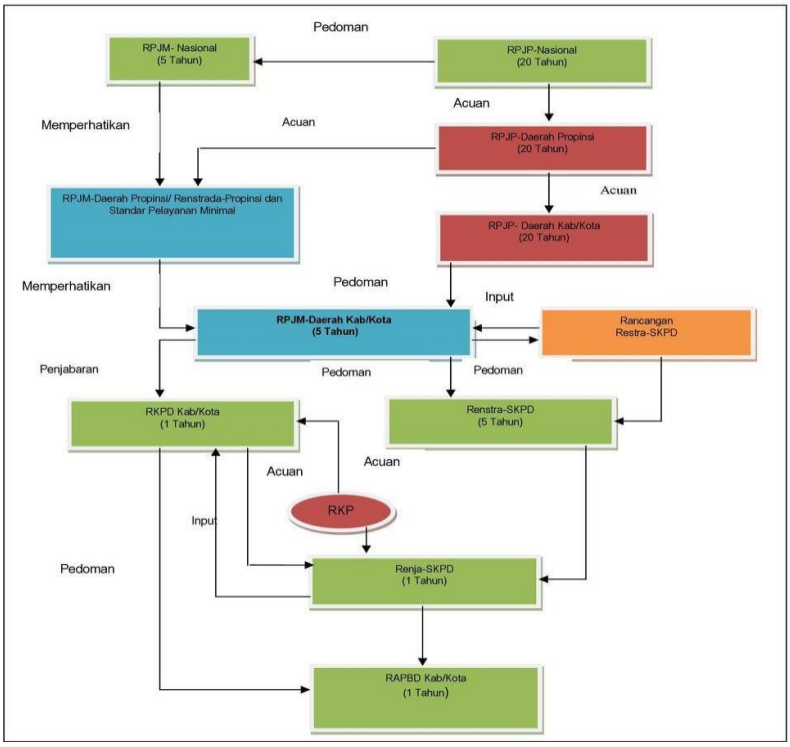

Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen

1.2 Landasan Hukum

Beberapa aturan yang terkait serta pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran PD serta penyusunan Renja antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang terdapat pada , dapat dirinci sebagai berikut:

A. *Aturan Umum terkait Penyusunan RENJA :*

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 03 tahun 2019 tentang

Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;

B. *Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :*

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social and Cultural Rights Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
4. Undang-Undang Pemilu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

12. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
13. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, tentang Hari Bela Negara;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
15. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019;
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011, tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.11 Tahun 2006, tentang Komunitas Intelejen Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014, tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

34. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
35. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 – 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
39. Peraturan Walikota Bandung Nomor 23 TAHUN 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Bandung dan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2013-2018.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung antara lain:

1. Merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Bandung;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan *(stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 2022 disusun, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja , fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (BAKESBANGPOL) pada Perubahan Renstra 2018-2023 melaksanakan urusan Fungsi Penunjang Lainnya Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik. Evaluasi ini memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun sedang berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Adapun evaluasi pelaksanaan kinerja BAKESBANGPOL tersebut dapat dilihat pada *Tabel 2.1. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja (BAKESBANGPOL) dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2021 (tahun berjalan / n-1)**

Evaluasi ini diperlukan guna melihat efektivitas program dan kegiatan kebutuhan anggaran yang telah dipergunakan dan melihat beberapa realisasi program dan kegiatan yang sudah memenuhi target, belum memenuhi, atau bahkan melewati target, faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi terlaksananya suatu program dan kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target kinerja dan akhirnya kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi beberapa faktor penyebab tersebut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Rencana Kerja tahun 2022 melakukan simplikas program / kegiatan sehingga program/kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 c.q. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah. Untuk rincinya bisa dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Bandung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4						Urusan Penunjang Lainnya									
4	05					Urusan Pemerintahan									
4	05	06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayana Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	12 JasaBulanan	12 JasaBulanan	12 JasaBulanan	12 JasaBulanan	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan	12 JasaBulanan	12 JasaBulanan	12 JasaBulanan	12 JasaBulanan	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Penggadaan Bulanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	---	---	2 laporan	2 laporan	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							PerundangUndangan bulanan								
4	05	06	01	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga IT	---	---	4 orang	4 orang	100%	-	-	-
4	05	06	01	01	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	4 Orang	4 Orang	2 rang	2 rang	100%	-	-	-
							Jumlah Tenaga Sopir	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	-	-	-
4	05	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur	Persentase Sarana dan Prasaranadalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
4	05	06	01	02	05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional R4	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
							Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional R2	4unit	4 unit	3 Unit	3 Unit	100%	-	-	-
4	05	06	01	02	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah laporan pengadaan Mebeulair	---	---	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-
4	05	06	01	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -	Laporan pemeliharaan gedung	---	---	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-
4	05	06	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
4	05	06	01	03	02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 stel	60 stel	60 stel	60 stel	100%	-	-	-
4	05	06	01	03	05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus HariHari Tertentu	60 stel	60 stel	60 stel	60 stel	100%	-	-	-
						Program Peningkatan Kesatuan Bangsa	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik	---	---	100%	---	100%	-	---	---
						KegiatanPengendalianKetahananEkonomi dan nIlai-nilaiBudaya	Jumlah Laporan Upaya Pengendalian ekonomi	---	---	3 laporan	---	100%	-	---	---

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Pembinaan Nilai-Nilai Luhur Budaya Pemersatu Bangsa	---	---	4 laporan	---	100%	-	---	---
						KegiatanPenguatanKerukunanKehidupan Bermasyarakat	Jumlah Pembinaan Kerukuna hidup	---	---	4 Pembinaan	---	100%	-	---	---
						KegiatanPemantapanEmpatKonsensus Dasar KehidupanBerbangsa dan Bernegara	Jumlah Pendidikan Bela Negara	---	---	4 kegiatan	---	100%	-	---	---
						KegiatanPembinaanIdeologi Pancasila	Jumlah Pembinaan Ideologi	---	---	2 Pembinaa	---	100%	-	---	---
						Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/PenggunaanMinumanKeras dan Narkoba	Jumlah Penyuluhan	---	---	5 kegiatan	---	100%	-	---	---
						Pengawasan dan Pendataan Orang Asingserta Lembaga Asing	Jumlah Pengawasan dan Pendataan	---	---	3 kegiatan	---	100%	-	---	---
						PenguatanPeran dan Komunikasi Masyarakat dalamPenanganan dan PenanggulanganPotensiKonflik	Jumlah Pembinaan	---	---	2 Pembinaan	---	100%	-	---	---
						KegiatanPenguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	---	---	2 kegiatan	---	100%	-	---	---
						Kegiatan Forum KomunikasiPimpinan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	---	---	3 kegiatan	---	100%	-	---	---
						KegiatanPembinaanOrganisasiKemasyarakatan dan Komunitas	Jumlah Pembinaan	---	---	13 Pembinaan	---	100%	-	---	---
						PembinaanPolitikbagi Masyarakat	Jumlah Pembinaan	---	---	6 Pembinaan	---	100%	-	---	---
8		01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Ideologi	---	---	---	---	---	100%	100%	100%
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Terlaksananya Pembinaan Ideologi dan wawasan Kebangsaan	---	---	---	---	---			
	8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Terlaksananya rapat kegiatan.	---	---	---	---	---			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya rapat persiapan.	---	---	---	---	---			
	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	▪ Terfasilitasi hibah. ▪ Terlaksananya jambore kebangsaan. ▪ Terlaksananya kemah Pancasila. ▪ Terlaksanaya upacara hari hari besar.. ▪ Terlaksananya pendididkan bela negara.	---	---	---	---	---			
	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananaya Koordinasi	---	---	---	---	---			
	8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan	Terlaksananaya Monitoring dan Evaluasi	---	---	---	---	---			
8		01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase konflik tidak menjadi konflik Lingkup Politik	---	---	---	---	---	100%	100%	100%
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Terlaksananya Pembinaan Politik	---	---	---	---	---			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
	8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.	---	---	---	---	---			
	8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksanaya rapat persiapan.	---	---	---	---	---			
	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terfasilitasinya hibah parpol. Terlaksananya bintek parpol. Terlaksanaya diskusi politik. Terlaksananya kemah parpol. Terlaksananya pembinaan politik masyarakat	---	---	---	---	---			
	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya koordinasi	---	---	---	---	---			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi.	---	---	---	---	---			
	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosilal Kemasyarakatan	---	---	---	---	---	100%	100%	100%
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Ormas	---	---	---	---	---			
	8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.	---	---	---	---	---			
	8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.	---	---	---	---	---			
	8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terfasilitasinya hibah ormas. Terlaksananya jambore ormas. Terlaksananya safari ormas. Terlaksananya sosialisasi undang undang ormas. Terlaksananya verifikasi ormas,	---	---	---	---	---			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya koordinasi.	---	---	---	---	---			
	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi.	---	---	---	---	---			
	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Ekonomi, Sosisal budaya	---	---	---	---	---	100%	100%	100%
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Koordinasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	---	---	---	---	---			
	8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.	---	---	---	---	---			
	8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.	---	---	---	---	---			
	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasinya hibah instansi vertikal. Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba.	---	---	---	---	---			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	Terlaksananya sosialisasi perda P4GN. Terlaksananya koordinasi ketahanan ekonomi.	---	---	---	---	---			
	8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi.	---	---	---	---	---			
	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Kewaspadaan nasional	---	---	---	---	---	100%	100%	100%
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kerjasams intelijen dan Koordinasi Kewaspadaan Nasinal	---	---	---	---	---			
	8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di BidangKewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.	---	---	---	---	---			
	8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksanaya rapat persiapan.	---	---	---	---	---			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar gara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terfasilitasinya hibah forum. Terfasilitasinya hibah instansi vertical. Terlaksananya FGD pengawasan orang asing. Terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat. Terlaksanaya konsolidasi pengawasan orang asing. Terlaksanaya konsolidasitim kewaspadaan dini daerah.	---	---	---	---	---			
	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksannya koordinasi kewaspadaan dini.	---	---	---	---	---			
	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya monitoring & evaluasi.	---	---	---	---	---			
	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya konsolidasi forum koordinasi pimpinan daerah	---	---	---	---	---			
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	---	---	---	---	---	100%	100%	100%
	X	XX	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	---	---	---	---	---			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terfasilisatinya Pakiana Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan Makanan dan minuman	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang tersedia	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jamlah Laporan pengadaan Meubel Mebeler	---	---	---	---	---			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jamlah Laporan pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	---	---	---	---	---			
	X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	---	---	---	---	---			

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

Dalam bagian ini menyajikan analisa capaian kinerja pelayanan BAKESBANGPOL berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam sasaran/target Renstra, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAKESBANGPOL serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tentang kinerja pelayanan. BAKESBANGPOL telah menyusun indikator kinerja pelayanan sesuai tupoksinya yang dituangkan pada perubahan Renstra BAKESBANGPOL 2018-2023 adalah:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota bandung

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			83	83,25	83,50	87	87,25	84,50	87,89

Untuk mengukur indikator pertama untuk sasaran pertama, yaitu Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik adalah jumlah potensi konflik yang bisa ditangani berbanding dengan jumlah potensi konflik (kejadian). Sampai dengan tahun 2021, target 100% bisa dicapai. Sedangkan untuk indikator kedua sasaran pertama, yaitu Persentase Masyarakat yang mengunakan hak pilihnya di Perubahan Renja 2018-2023 dihilangkan. Selain indikator diatas Bakesbangpol memiliki indikator sasaran kedua yang bersifat generik, yaitu Indeks Kepuasan Masyarkat. Untuk mengukurnya memakai cara kuisioner kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa surat ijin penelitian/kerja praktek/survey. Tahun 2021 target 83,5 bisa dicapai di 87,89.

Untuk sasaran petama factor pendukung utama adalah koordinasi yang baik dengan jajaran samping dan mengoptimalkan koordinasi dengan forum-forum mitra strategis Bakesbangpol. Dan untuk sasaran kedua didukung dengan penambahan fasilitas di ruang pelayanan sehingga waktu pelayanan bisa lebih cepat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama, dan juga situasi keamanan yang terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kota Bandung dapat dikemukan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai berikut :

1. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurang kewajiban pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuasa kepentingan kelompok atau golongan, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum dan terjadinya demontrasi yang memprotes pemerintah.
2. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dikarenakan Hetrogenitas dan Multikultural serta perkembangan dinamika kehidupan masyarakat juga arus globalisasi khususnya dibidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi memunculkan akses – akses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional.

3. Meningkatnya Pengguna Narkoba seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan;
4. Pendataan Orang asing belum bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai anggota Tim PORA secara mandiri.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2022 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2022 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2022 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan. Pada tahun 2022 program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terjadi perubahan nomenklatur program, yang dimulai seak tahun 2021 berdasarkan Pemendagri No.90 Tahun 2019 c.q. Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020. Pada rencana kerja tahun 2022 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2022. Berikut ini adalah tabel review rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2022.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Bandung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsad an Politik					40.274.646.051					40.274.646.051	
I	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ideologi	100%	840.289.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ideologi	100%	840.289.000	
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Bandung	Pembinaa	4	840.289.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Bandung	Pembinaa	4	840.289.000	
-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pendidikan Bela Negara	4	831.189.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal		Pendidikan Bela Negara	4	831.189.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ika dan Sejarah Kebangsaan					
-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Terlaksananya Rapat Koordinasi	2	9.100.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Terlaksananya Rapat Koordinasi	2	9.100.000	
II	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Politik	100%	10.174.038.113	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Politik	100%	10.174.038.113	
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya		Pembinaan	12	10.174.038.113	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan		Pembinaan	12	10.174.038.113	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah		PembinaanPolitik	12	2.031.855.800	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah		PembinaanPolitik	12	2.031.855.800	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Terlaksananya Rapat Koordinasi		8.142.182.313	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Terlaksananya Rapat Koordinasi		8.142.182.313	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Sosila Masyarakat	100%	661.760.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Sosila Masyarakat	100%	661.760.000	
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Pembinaan	12	661.760.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan		Pembinaan	12	661.760.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Organisasi Kemasyarakatan					
-	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pembinaan dan verifikasi	12	661.760.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pembinaan dan verifikasi	12	661.760.000	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	1.161.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	1.161.500.000	
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Koordinasi	4	1.161.500.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Koordinasi	4	1.161.500.000	
-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang		Koordinasi	4	1.161.500.000	Pelaksanaan Kebijakan di		Koordinasi	4	1.161.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat					Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat					
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Wadnas	100%	15.172.674.400	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Wadnas	100%	15.172.674.400	
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Kerajsaama	20	15.172.674.400	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Kerajsaama	20	15.172.674.400	
-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja		Kerajsaama iNtelijen dan fasiliotasi	18	13.776.574.400	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,		Kerajsaama iNtelijen dan fasiliotasi	18	13.776.574.400	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar					Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar					
-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Koordinasi	1	1.268.100.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Koordinasi	1	1.268.100.000	
-	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		fasilitasi	1	128.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		fasilitasi	1	128.000.000	
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12.264.384.538	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12.264.384.538	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kabupaten/Kota			KABUPATEN/KOTA		Kabupaten/ Kota			
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan	100%	9.383.057.672	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan	100%	9.383.057.672	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terfasilisatinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 TAHUN	9.383.057.672	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terfasilisatinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 TAHUN	9.383.057.672	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	36.200.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	36.200.000	
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terfasilisatinya Pakiana Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55 STEL	36.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terfasilisatinya Pakiana Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55 STEL	36.200.000	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	632.970.478	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	632.970.478	
-	Penyediaan Peralatan dan		Tersedaianya Peralatan dan	1 TAHUN	55.103.878	Penyediaan Peralatan dan		Tersedaianya Peralatan	1 TAHUN	55.103.878	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkapan Kantor		perlengkapan kantor			Perlengkapan Kantor		dan perlengkapan kantor			
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedinaya Peralatan Rumah tangga	1 tahun	14.904.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedinaya Peralatan Rumah tangga	1 tahun	14.904.200	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan Logistik kantor	12 bulan	187.806.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan Logistik kantor	12 bulan	187.806.400	
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Bahan Cetak dan penggandaan	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Bahan Cetak dan penggandaan	12 bulan	25.000.000	
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	300.060.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	300.060.000	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	50.096.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	50.096.000	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	278.416.600	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	278.416.600	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebeler	1 tahun	11.616.600	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebeler	1 tahun	11.616.600	
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	1 tahun	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	1 tahun	-	
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedinaya Kendaran Dinas Operasional	1 unit r4; 1 unit r2	266.800.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedinaya Kendaran Dinas Operasional	1 unit r4; 1 unit r2	266.800.000	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	888.763.200	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	888.763.200	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan/jasa	455.047.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan/jasa	455.047.200	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 oerang / bulan	394.380.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 oerang / bulan	394.380.000	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	39.336.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	39.336.000	
6	Kegiatan Pemeliharaan		Cakupan Pemeliharaan	100%	1.044.976.588	Kegiatan Pemeliharaan		Cakupan Pemeliharaa	100%	1.044.976.588	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	925.069.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	925.069.600	
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor	1 tahun	26.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor	1 tahun	26.400.000	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gdunga Kantor	1 tahun	93.506.988	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gdunga Kantor	1 tahun	93.506.988	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan kebijakan penyelenggaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung juga merujuk pada Kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di bidang Politik dan Pemerintahan Umum dengan prioritas nasional Stabilitas Keamnan Nasional dan kesuksesan Pemilu yang memiliki Program/Kegiatan Di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2022 dengan Kegiatan :

ISU-ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN
BINA IDEOLOGI KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
1. Ancaman Dan Radikalisme Ideologi	1. Pembinaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Dan Aparatur
2. Potensi Konflik Yang Disebabkan Oleh Isu Sara	2. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila
3. Ujaran Kebencian (Hate Speech)/Berita Bohong (Hoax)/Adu Domba Menggunakan Isu Sara Melalui Berbagai Media	3. Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu Dalam Kebhinekaan
4. Politisasi Agama	4. Pengaturan Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Di Daerah
FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI	
1. Dukungan Persiapan Pelaksanaa Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024	1. Dialog Refleksi Dan Proyeksi Dinamika Politik Pra Dan Pasca Pemilu 2024

2. Seleksi Anggota Penyelenggar Pemilu	2. Sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat Dalam Rangka Sukses Pemilu Tahun 2024
3. Bantuan Keuangan Partai Politik	3. Penguatan Kepada Masyarakat Dan Aparatur Terkait Implementasi Kebijakan Politik Dalam Sukses Pemilu Serentak 2024
4. Indeks Demokrasi Indonesia	4. Pembentukan Tim Pemantauan Khusus Situasi Politik Dalam Negeri Pra Dan Pasca Pemilu Serentak 2024
5. Partisipasi Politik	
6. Politik Identitas	
KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	
1. Ketahanan Ekonomi Di Masa Pendemi Covid 19	1. Indeks Harmoni Indonesia
2. Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi Covid 19	2. Pokja Harmoni Indonesia
3. Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prepursor Narkotika P4GN Dan PN	3. Penguatan Penagangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya
4. Ketahanan Seni Dan Budaya	4. Penguatan Nilai-Nilai Seni Dan Budaya Serta Kearifan Lokal Dalam Rangka Memperkokoh Kebhinekaan
5. Kerukunan Umat Beragama	5. Penguatan Dan Pemeliharaan Kerukanan Umat Beragama Dan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORMAS	
1. Keberagaman Dan Potensi afiliasi Politik Ormas	1. Kemitraan (Memperkokoh Kemitraan Antara Pemerintah Dan Ormas Termasuk Ormas Asing

	Dengan Mendorong Program Yang Berkontribusi Positif Pada Pembangunan)
2. Aktivitas Ormas Asing Dan Ormas Yang Terafiliasi Dengan Lembaga Asing	2. Optimalisasi Layanan Dan Penguatan Siormas (Penyiapan SDM Layanan Dan Pembangunan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Digunakan Sebagai Media Bagi K/L, Pemda, Ormas Serta Masyarakat Umum).
3. Dinamika Pendaftaran Dan Sengketa Internal	3. Koordinasi Daerah (Meningkatkan Peran Daerah Dalam Pengawasan Ormas Dengan Metode Pengawasan Ormas Berbasis Data Yang Akurat).
4. Infiltrasi Paham Terorisme	4. Penguatan Kebijakan (Penguatan Terhadap Peraturan Untuk Mengisi Potensi Celah Kebijakan Di Tingkat Pusat dan Daerah).
5. Konflik Horisantal Antar Ormas	
6. Potensi Hate Crime Yang Dilakukan Ormas	
FASILITASI KEWASPADAAN NASIONAL	
1. Pelaporan Situasi Daerah Harian, Mingguan Dan Bulanan Secara Berjenjang;	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat Dan Daerah
2. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Dan Tim Wasdin Pemda;	2. Laporan Situasi Daerah
3. Pemantauan Penanganan Kewaspadaan Pandemi Covid-19 (Penolakan Vaksin Covid-19)	3. Laporan Khusus
4. Antisipasi Penanganan Ormas/Kelompok Yang Mengganggu Situasi Politik/Kamtibmas;	4. Surat Keterangan Penelitian

5. Penanggulangan Dan Pencegahan Pahan Radikal;	5. Pemantauan Aksi Unjuk Rasa
6. Penolakan Terkait Program Dan Kebijakan Pemerintah.	6. Penanganan Radikal Dan Separatisme
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
1. Penyesuaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Penyesuaian RAD Penanganan Konflik Pada Masa Pandemi Covid19);	1. Indeks Kewaspadaan Nasional;
2. Terdapat Kab/Kota Yang Belum Membentuk Tim Terpadu PKS;	2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
3. Pencegahan Terhadap Peningkatan Konflik Komunal Di Daerah	3. Penanganan Paham Radikal Mengarah Kepada Terorisme
4. Rekapitulasi Berkala Peristiwa Konflik Sosial Daerah.	4. Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
	5. Rekapitulasi Peristiwa Konflik Secara Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung secara teknokratik ditempuh dengan menelaah visi dan misi Kota Bandung, kebijakan pembangunan jangka memengah nasional dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Badan Kesatuan bangsa dana Politik dalam perubahan RPJMD Kota Bandung terkait dengan *Misi 1 yaitu "Membangun masyarakat yang humanis, agamis, bekualitas dan berdaya saing serta mendukung" Misi 2 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih*" Untuk melaksanakan hal

tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik menetapkan Tujuan Terjaganya kodusifitas Kota Bandung dan *"Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Kesatuan Bangsa Dan Pendidikan Politik".*

Berdasarkan hasil perumusan tujuan, maka sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung terdiri dari:

1. Meningkatnya Pembinaan kerukunan aspek ideologis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
Misi 1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas & Berdaya Saing							
Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100%	100%	100%	100%	100%
Misi II: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih							
Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83%	83,25%	83,25%	87,00%	87,25%

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah keselarasan program Ditjen Polpum kemendagri dan pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung tahun 2018-2023

Rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2022

Jumlah Program : 6 (enam)

Jumlah Kegiatan : 11 (sebelas)

Jumlah Sub Kegiatan : 25 (dua puluh lima)

Pagu Indikatif APBD : Rp 40.274.646.051

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
KOTA BANDUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ideologi	Kota Bandung	100%	840.289.000	APBD		100%	84028900
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaa		4	840.289.000			4	84028900
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendidikan Bela Negara		4	831.189.000			4	83118900
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi		2	9.100.000			2	910000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Politik		100%	10.174.038.113			100%	1.017.403.811
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pembinaan		12	10.174.038.113			12	1.017.403.811
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	PembinaanPolitik		12	2.031.855.800			12	203.185.580

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah								
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi			8.142.182.313				814.218.231
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Sosila Masyarakat		100%	661.760.000			100%	66.176.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan		12	661.760.000			12	66.176.000
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pembinaan dan verifikasi		12	661.760.000			12	66.176.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ekonomi, Sosial, dan Budaya		100%	1.161.500.000			100%	116.150.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Koordinasi		4	1.161.500.000			4	116.150.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Koordinasi		4	1.161.500.000			4	116.150.000
		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Wadnas		100%	15.172.674.400			100%	1.517.267.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kerajsaama		20	15.172.674.400			20	1.517.267.440
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kerajsaama iNtelijen dan fasiliotasi		18	13.776.574.400			18	1.377.657.440
		Koordinasi		1	1.268.100.000			1	126.810.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi		1	128.000.000			1	12.800.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	12.264.384.538			100%	1.226.438.454
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan		100%	9.383.057.672			100%	938.305.767
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terfasilisatinya Gaji dan Tunjangan ASN		1 TAHUN	9.383.057.672			1 TAHUN	938.305.767
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	36.200.000			100%	3.620.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terfasilisatinya Pakiana Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		55 STEL	36.200.000			55 STEL	3.620.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	632.970.478			100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedaianya Peralatan dan perlengkapan kantor		1 TAHUN	55.103.878			1 TAHUN	63.297.048 5.510.388
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedinaya Peralatan Rumah tangga		1 tahun	14.904.200			1 tahun	1.490.420
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik kantor		12 bulan	187.806.400			12 bulan	18.780.640
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan penggandaan		12 bulan	25.000.000			12 bulan	2.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	300.060.000			12 bulan	30.006.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 tahun	50.096.000			1 tahun	5.009.600
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	278.416.600			100%	27.841.660
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler		1 tahun	11.616.600			1 tahun	1.161.660
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya		1 tahun	-			1 tahun	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedinaya Kendaran Dinas Operasional		1 unit r4; 1 unit r2	266.800.000			1 unit r4; 1 unit r2	26.680.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	888.763.200			100%	88.876.320

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan /jasa	455.047.200			12 Bulan /jasa	45.504.720
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		7 oerang / bulan	394.380.000			7 oerang / bulan	39.438.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	39.336.000			12 bulan	3.933.600
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.044.976.588			100%	104.497.659
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 tahun	925.069.600			1 tahun	92.506.960
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor		1 tahun	26.400.000			1 tahun	2.640.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gdunga Kantor		1 tahun	93.506.988			1 tahun	9.350.699

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 4.1
Rencana Kerjadan Pendanaan Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KOTA BANDUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ideologi	Kota Bandung	100%	840.289.000	APBD		100%	84028900
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaa		4	840.289.000			4	84028900
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendidikan Bela Negara		4	831.189.000			4	83118900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi		2	9.100.000			2	910000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Politik		100%	10.174.038.113			100%	1.017.403.811
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pembinaan		12	10.174.038.113			12	1.017.403.811
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah	PembinaanPolitik		12	2.031.855.800			12	203.185.580
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi			8.142.182.313				814.218.231
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Sosila Masyarakat		100%	661.760.000			100%	66.176.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan		12	661.760.000			12	66.176.000
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pembinaan dan verifikasi		12	661.760.000			12	66.176.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ekonomi, Sosial, dan Budaya		100%	1.161.500.000			100%	116.150.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Koordinasi		4	1.161.500.000			4	116.150.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Koordinasi		4	1.161.500.000			4	116.150.000
		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Wadnas		100%	15.172.674.400			100%	1.517.267.440
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kerajsaama		20	15.172.674.400			20	1.517.267.440
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kerajsaama iNtelijen dan fasiliotasi		18	13.776.574.400			18	1.377.657.440
		Koordinasi		1	1.268.100.000			1	126.810.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	fasilitasi		1	128.000.000			1	12.800.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	12.264.384.538			100%	1.226.438.454
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan		100%	9.383.057.672			100%	938.305.767
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terfasilisatinya Gaji dan Tunjangan ASN		1 TAHUN	9.383.057.672			1 TAHUN	938.305.767
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	36.200.000			100%	3.620.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terfasilisatinya Pakiana Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		55 STEL	36.200.000			55 STEL	3.620.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	632.970.478			100%	63.297.048
		Tersedaianya Peralatan dan perlengkapan kantor		1 TAHUN	55.103.878			1 TAHUN	5.510.388
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedinaya Peralatan Rumah tangga		1 tahun	14.904.200			1 tahun	1.490.420
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik kantor		12 bulan	187.806.400			12 bulan	18.780.640
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan penggandaan		12 bulan	25.000.000			12 bulan	2.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	300.060.000			12 bulan	30.006.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 tahun	50.096.000			1 tahun	5.009.600
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	278.416.600			100%	27.841.660
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler		1 tahun	11.616.600			1 tahun	1.161.660
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya		1 tahun	-			1 tahun	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedinaya Kendaran Dinas Operasional		1 unit r4; 1 unit r2	266.800.000			1 unit r4; 1 unit r2	26.680.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	888.763.200			100%	88.876.320
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan /jasa	455.047.200			12 Bulan /jasa	45.504.720
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		7 oerang / bulan	394.380.000			7 oerang / bulan	39.438.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	39.336.000			12 bulan	3.933.600
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.044.976.588			100%	104.497.659
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 tahun	925.069.600			1 tahun	92.506.960

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor		1 tahun	26.400.000			1 tahun	2.640.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gdunga Kantor		1 tahun	93.506.988			1 tahun	9.350.699

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruhnya bersifat non fisik. Kegiatan-kegaitan lebih kearah fasilitasi dan pembinaan, sehingga tidak terasa langsung di masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memiliki 6 (enam) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif APBD : Rp 40.274.646.051

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaain hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung tahun 2018-2023 yang kemudian diturunkan dalam kerangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja Tahun 2022, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 40.274.646.051,- (yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2021 DAN 2022					
URAIAN	TAHUN ANGGARAN			SELISIH APBD 2022 DGN 2021 (M)	SELISIH APBD 2022 DGN 2021 (P)
	TH.2021 (M)	TH.2021(P)	TH.2022 (M)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Gaji/Tunjangan	9,018,702,107	8,418,702,107	9,383,057,672	364,355,565	964,355,565
Adum	3,636,067,100	3,997,028,965	2,881,326,866	-754,740,234	-1,115,702,099

Urusan	8,110,646,800	4,244,173,868	4,667,529,001	-3,443,117,799	423,355,133
HIBAH	15,857,228,500	15,757,228,500	23,342,732,512	7,485,504,012	7,585,504,012
JUMLAH	36,622,644,507	32,417,133,440	40,274,646,051	3,652,001,544	7,857,512,611

Program pendukung/Penunjang dimaksudkan untuk mendukung seluruh kegiatan teknis khusunya untuk belanja Makanan dan Minuman rapat, ATK dan penggandaan. Untuk Program Teknis seluruh kegiatan dikemas semenarik mungkin karena bersifat kampanye atau pembinaan yang selama ini dianggap menjemukan. Seluruh kegiatan diusahan diluar ruangan kecuali yang bersifat koordinasi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengoptimalkan seluruh Anggaran dan mecapai hasil *(outcome)* program maupun keluaran *(output)* kegiatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung akan lebih meningkatkan Koordinasi dengan seluruh stakeholder urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjaga kondusifitas negara khususnya di Kota Bandung.

Tema seluruh sub kegiatan akan disesuaikan dengan isu yang hangat baik isu lokal maupun nasional, karena isu mengenai kesatuan bangsa dan politik sangat dinamis.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671005 198903 1 008